

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEKOLAH
GRATIS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI
KELUARGA SISWA KURANG MAMPU
(Studi Kasus di SMA PGRI Ledralaya)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Mencapai Derajat SI Ilmu Sosiologi**



Oleh:

**ROLASTA MENDROFA SILABAN
07061002080**

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

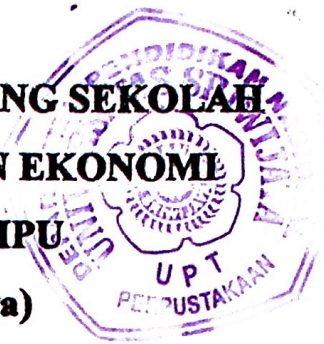
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2010

2010
sonid

S
306.857
R01
d
e-102079
2010

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEKOLAH
GRATIS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI
KELUARGA SISWA KURANG MAMPU
(Studi Kasus di SMA PGRI Indralaya)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Mencapai Derajat SI Ilmu Sosiologi**



Oleh:

**ROLASTA MENDROFA SILABAN
07061002080**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2010

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEKOLAH
GRATIS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI
KELUARGA SISWA KURANG MAMPU
(Studi Kasus di SMA PGRI Indralaya)**

SKRIPSI

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk Mengikuti Ujian
Komprehensif dalam Memenuhi sebagai Persyaratan Mencapai Derajat
S-I Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh
ROLASTA MENDROFA SILABAN
07061002030**

**Dosen Pembimbing I
Drs. Tri Agus Susanto, MS
NIP.19580825-1982-031003**

**Dosen Pembimbing II
Merry Yanti, S.sos, MA
NIP.197705042000122001**

KUALITAS PENGALAMAN



**DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEKOLAH GRATIS
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA SISWA
KURANG MAMPU**

(Studi di Kasus SMA PGRI Indralaya)

SKRIPSI

**Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dari Syarat-
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal 27 Oktober 2010**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Drs. Tri Agus Susanto
Ketua

Merry Yanti, S.sos. MA
Anggota

Dr. Zulfikri Saleman, MA
Anggota

Suryadri, S.sos. MA
Anggota



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**

Dekan

Dra. Dyah Hansari, ENH, M.si
NIP. 196010021992032001

MeTTe :

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghinakan hikmat dan didikan (Amsal 1:7)

**Janganlah Seorang Pun menganggap engkau rendah karna engkau muda, Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.
(1 Timotius 4:12)**

**Skripsi Ini Ku persembahkan
Untuk :**

- 1. My SavIor Jesus Christ**
- 2. Bapak dan Mama Tercinta**
- 3. Adek-adekKu Termanis**
- 4. LuphiKu Tersayang**
- 5. AlmamaterKu**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Ucapakan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karna berkat kasih dan PertolongaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul “Dampak Kebijakan Sekolah Gratis dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Siswa Kurang Mampu (studi kasus di SMA PGRI INDRALAYA)” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi.

Pada Kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Ibu Dyah Hapsari, ENH, M.si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas sriwijaya.
2. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku ketua jurusan Sosiologi
3. Bapak Drs.Tri Agus Susanto, MS Selaku Pembimbing I yang dengan sabar memberikan nasehat, bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi sampai dengan selesai
4. Ibu Merry Yanti, S.sos, MA selaku pembimbing II yang telah memberi nasehat, masukan serta motivasi selama penulisan skripsi sampai dengan selesai.
5. Ibu Yunindyawati, S.sos, M.si selaku pembimbing akademik penulis di jurusan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

6. Dosen-dosen di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan.
7. Seluruh staf dan tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terimakasih untuk kemudahan yang diberikan.
8. Kedua Orang Tua yang penulis sayangi, Bapak V. Silaban dan Mama H.R. Siregar yang memberi dukungan baik secara moril maupun materi. Borumu rindu memberikan yang terbaik untuk setiap kucuran keringatmu, semoga air mata dalam setiap doamu menjadi madu yang manis yang bisa kupersembahkan bagimu.
9. Semua Adek-adek yang penulis banggakan, Betharia, Nita, Panggil, Ganda, Lusi, Sari, Ifan, Kiki, Natan, Ana, Riki, Encus, Aldo, Imko, Jellyta, Fran, Wilson, Hana, Edrik. Terimakasih Buat doanya, rajin-rajin sekolah ya dek..
10. Namboruku tersayang, terimakasih telah membesarkan serta mendidik aku dengan cinta dan kesabaran. Engkau adalah motivator terbaik.
11. Abang Fandri Siburian, S.TP, terimakasih buat kasih sayang, kesabaran, pengertian dan dukungannya. Ketika kita bisa meraih mimpi setinggi langit semoga kita diberi hati sedalam lautan, "*Good luck for us*"
12. Bapak Kepala Sekolah SMA PGRI Indralaya Drs.Mutsanni Ahmad dan semua Guru-guru SMA PGRI Indralaya yang telah banyak membantu.
13. Teman-teman jurusan sosiologi angkatan 2006 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih buat kebersamaan selama kuliah. Aku bangga mengenal kalian semua.

14. Buat teman Satu Kosan (Nora Siburian dan Nova Sagala) semangat kuliahnya dek asa hatop tamat, buat tetangga (Josen, Sahat, Ignatius, Nicolas, Harapan) semangat kuliahnya.
15. Buat Irma Gloria Purba, S.IP sukses buatmu Bug, buat Annisa, Fanny sinaga, Feronika, makasih ya sudah menjadi sahabat-sahabat terbaikku.
16. Buat semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih buat bantuannya.

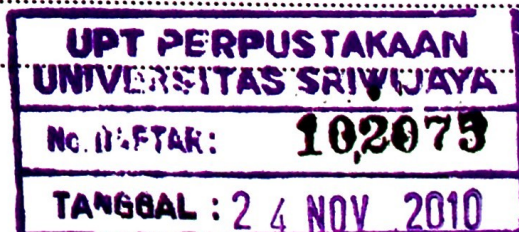
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua pihak

Indralaya, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat	12
1.4 Tinjauan Pustaka	13
1.4.2 Dampak	15
1.4.3 Keluarga Kurang Mampu	17
1.4.4 Studi Terdahulu	20
1.4.5 Sekolah Gratis dalam kemampuan memenuhi Kebutuhan Ekonomi Siswa Kurang Mampu	23
1.5 Kerangka Pemikiran	24
1.5.1 Program Sekolah Gratis	24
1.5.2 Teori Struktur Fungsional	27
1.5.3 Perubahan Sosial	29
1.6 Metode Penelitian	36
1.6.1 Desain Penelitian	36
1.6.2 Lokasi Penelitian	37
1.6.3 Unit Analisis Data	37
1.6.4 Penentuan Informan	37
1.6.5 Batasan Pengertian	38



1.7 Data dan Sumber Data	39
1.8 Teknik Pengumpulan Data	40
1.9 Teknik Analisis Data	43
BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN	45
2.1 Deskripsi Daerah Penelitian	45
2.1.2 Kependudukan dan Angkatan Kerja	45
2.1.3 Tingkat Pendidikan	46
2.1.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	47
2.2 Sejarah Singkat Pendirian SMA PGRI Indralaya	49
2.2.1 Visi Sekolah	48
2.2.2 Misi Sekolah	49
2.2.3 Tujuan Sekolah	50
2.3 Keadaan Siswa	51
2.3.1 Data Siswa	51
2.3.2 Rombongan Belajar	52
2.3.3 Data Guru	53
2.3.4 Staf Tata Usaha	54
2.3.5 Sarana dan Prasarana	55
2.4 Organisasi dan Administrasi Sekolah	56
2.5 Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Siswa	57
2.6 Program Sekolah Gratis	57
2.7 Deskripsi Informan Penelitian	58
2.7.1 Pekerjaan Informan	60
2.7.2 Status Tempat Tinggal Informan	61
2.7.3 Tingkat Pendapatan dan Jumlah Tanggungan	62
2.8 Keadaan Umum Informan Penelitian	64
BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA	67
3.1 Keluarga Kurang Mampu	67
3.2 Program Sekolah Gratis	73
3.3 Output Sekolah Gratis Bagi Keluarga siswa Kurang Mampu	74

3.4 Outcome (Manfaat) Sekolah Bagi Keluarga Kurang Mampu	80
3.5 Benefit (Keuntungan) Sekolah Gratis	
Bagi Keluarga Siswa Kurang Mampu	92
3.6 Dampak Sekolah Gratis dalam Memenuhi Kebutuhan	
Keluarga siswa Kurang Mampu	95
3.6.1 Dampak Yang Disadari	97
3.6.2 Dampak Yang Tidak Disadari	98
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Tamatan SLTP dan SMU Tahun 2007/2008	3
Tabel 2.1 Penjurusan SMA PGRI Indralaya Tahun 2008/2009	52
Tabel 2.2 Pembagian Rombongan Belajar/Kelas	52
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana	55
Tabel 2.4 Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga	57
Tabel 2.5 Nama-Nama Informan	59
Tabel 2.6 Identitas Informan Menurut Pekerjaan	69
Tabel 2.7 Status Tempat Tinggal Informan	61
Tabel 2.7 Tingkat Pendapatan dan Jumlah Tanggungan	63
Tabel 3.5 Manfaat Sekolah Gratis	88

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.5.3 Kerangka Berfikir Penelitian	35
Bagan 2.4.1 Struktur Organisasi SMA PGRI Indralaya	56

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Dampak Kebijakan Sekolah Gratis dalam Memenuhi kebutuhan Ekonomi Keluarga Siswa Kurang Mampu (Studi kasus di SMA PGRI INDRALAYA)”. Mengkaji permasalahan dampak kebijakan sekolah gratis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga siswa kurang mampu. Dengan mengkaji output, manfaat,serta keuntungan yang diterima keluarga siswa dari adanya sekolah gratis. Tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran umum dampak positif dari adanya sekolah gratis bagi keluarga siswa kurang mampu.

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan data deskriptif dari realitas yang diteliti, dengan pendekatan studi kasus penentuan informan digunakan secara *purposive*. Informan dalam penelitian ini dipilih 10 informan yang keseluruhan adalah orang tua siswa. Selain itu menambah kedalaman informasi data, diwawancarai juga kepala sekolah serta guru-guru, dan siswa SMA PGRI INDRALAYA. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi, dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa output dari adanya kebijakan sekolah gratis adalah setiap orang tua siswa tidak lagi membayar biaya sekolah anak-anak mereka berupa uang pembangunan dan uang SPP setiap bulannya. Dan biaya sekolah yang telah gratis dapat dimanfaatkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti membeli beras, membayar listrik, membeli peralatan sekolah anak, dan membayar biaya kursus anak. Hal ini dirasakan memberi keuntungan bagi keluarga karena telah membantu meringankan biaya hidup sehari-hari. Adanya manfaat dan keuntungan yang dirasakan keluarga kurang mampu dari adanya sekolah gratis, menggambarkan bahwa sekolah gratis memberi dampak positif bagi keluarga siswa kurang mampu yang secara tidak langsung membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Kata Kunci : Dampak sekolah gratis, Keluarga Siswa Kurang Mampu, Pemenuhan kebutuhan ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Situasi pemenuhan hak atas pendidikan di Sumatera selatan sebelum adanya bantuan operasional sekolah atau bantuan sekolah gratis dari Pemerintah provinsi pada tahun 2005 masih jauh dari harapan masyarakat yang notabene berharap banyak terhadap pemerintahan baru. Buruknya pemenuhan hak atas pendidikan tahun ini adalah tak lepas dari tumpukan persoalan pada masa pemerintahan sebelumnya, namun demikian persoalan-persoalan mendasar seperti akses terhadap pendidikan, pengurangan siswa putus sekolah, penguatan dan motivasi atas institusi-institusi pendidikan dasar umum dan khusus (untuk anak-anak cacat) yang sudah ada dan penanganan akses pendidikan di wilayah terpencil belum tertanggulangi secara nyata.

Kondisi ini nampak terlihat jelas dalam laporan-laporan media massa di tahun 2005 yang masih menyoroti dalam pemberitaan mereka tentang jumlah angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dari kalangan penduduk miskin yang terus merangkak naik. Disamping itu, pemberitaan media tentang runtuhnya bangunan sekolah serta ketidakmampuan sekolah menampung jumlah siswa yang membengkak adalah fakta bahwa upaya penguatan dan *support* atas institusi pendidikan dasar umum dan untuk anak-anak cacat oleh pemerintah terus menurun, termasuk juga disini buruknya mekanisme perlindungan anak-anak dari tindak kekerasan dan praktek diskriminasi oleh institusi pendidikan dasar, menengah dan atas. Hal lain yang juga penting untuk dijadikan patokan dalam

melihat minimnya pemenuhan hak atas pendidikan, adalah belum tersentuhnya akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum tersentuh pembangunan nasional atau pun daerah.

Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, sampai dengan tahun 2005 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan, terutama anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dari tahun ke tahun, jumlah anak sekolah mengalami penurunan. Pada tahun 2002/2003 terdapat 560.323 siswa SD yang tidak mampu melanjutkan sekolah, pada tahun 2003/2004 terdapat 542 258, tahun 2004/2005 angkanya masih cukup tinggi, yaitu sebesar 495.261. Jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah juga mengalami peningkatan. Data MTs menunjukkan bahwa pada tahun 2002/2003 terdapat 88.809 siswa putus sekolah, tahun 2003/2004 melonjak menjadi 91.905 dan terus melonjak lagi 2004/2005 menjadi 92 417 siswa. (*Nanning Mardiniah. 2005: 66-67*)

Di Sumatera Selatan sendiri berdasarkan jumlah tamatan sekolah SLTP atau SMU mengalami kemunduran setiap tahun. Berikut data jumlah tamatan SLTP pada Tahun 2007/2008 dan lima tahun sebelumnya dengan jumlah tamatan SMU Sumatera selatan pada Tahun 2007/2008 dan lima tahun sebelumnya. Seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Tamatan SLTP dan SMU Tahun 2007/2008

Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP)			Sekolah Menengah Umum (SMU)		
Kabupaten/Kota		Jumlah/Total	Kabupaten/Kota		Jumlah/Total
1. Ogan Komering Ulu		4.076	1. Ogan Komering Ulu		2.507
2. Ogan Komering Ilir		6.537	2. Ogan Komering Ilir		2.588
3. Muara Enim		7.402	3. Muara Enim		3.567
4. Lahat		5.050	4. Lahat		3.110
5. Musi Rawas		4.875	5. Musi Rawas		2.057
6. Musi Banyu Asin		5.104	6. Musi Banyu Asin		2.396
7. Banyuasin		5.600	7. Banyuasin		2.488
8. OKU Selatan		2.945	8. OKU Selatan		1.407
9. OKU Timur		7.821	9. OKU Timur		3.011
10. Ogan Ilir		2.981	10. Ogan Ilir		1.983
11. Empat Lawang		2.743	11. Empat Lawang		1.338
12. Palembang		22.324	12. Palembang		16.817
13. Prabumulih		2.082	13. Prabumulih		1.251
14. Pagar Alam		1.720	14. Pagar Alam		1.214
15. Lubuk Linggau		3.121	15. Lubuk Linggau		2.230
Jumlah (Total)	2007/2008	83.742	Jumlah (Total)	2007/2008	47.874
	2006/2007	55.221		2006/2007	60.833
	2005/2006	70.044		2005/2006	51.781
	2004/2005	67.704		2004/2005	50.720
	2003/2004	65.451		2003/2004	45.797

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas di Sumatera Selatan jika dibandingkan jumlah murid yang tamat pendidikan sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pada tahun 2005/2006 yaitu 70.044 menurut kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Selatan dan yang dapat tamat pada tingkat SMU untuk tiga tahun berikutnya hanya 47.874. ini berarti sekitar 22.170 tidak menyelesaikan sekolah sampai jenjang SMU. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa putus sekolah dan salah satu faktor yang dominan adalah masalah perekonomian. Sebagian besar penyebab utama kasus anak putus sekolah adalah karena ongkos pendidikan yang terus merangkak mahal. Besarnya pungutan yang diterapkan sekolah, mulai dari

uang LKS dan Buku paket, SPP/Komite tiap bulan, pendaftaran masuk sekolah, uang bangunan, uang ujian, biaya praktikum, study tour, olah raga, hingga uang ekstrakurikuler menjadi penyebab tingginya anak tidak sekolah dan putus sekolah, diketahui bahwa kebanyakan para orang tua mengatakan bahwa mereka terpaksa tidak menyekolahkan anaknya atau mengeluarkan anaknya dari sekolah karena mereka harus mengeluarkan dana pendidikan lebih dari Rp 300 ribu per orang per bulan. Padahal jumlah itu adalah jumlah penghasilan mereka per bulan. (*Lokakarya Ifdhal Kasim, 25 Januari 2008*)

Dalam beberapa soal mereka mencoba untuk mensiasati dengan meminta keringanan pembayaran dan mencicil proses pembayaran, namun demikian upaya tersebut tidak bisa dijalani oleh banyak keluarga karena jumlah anak yang harus mereka tanggung bukan hanya satu orang. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang sifatnya menyeluruh. Sebab percuma saja, jika kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pendidikan masih rendah. Masalah penyelenggaraan Wajib Belajar Sembilan tahun sejatinya masih menjadi PR besar bagi kita. Kenyataan yang dapat kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah pinggiran yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Dengan terbengkalainya program wajib belajar sembilan tahun mengakibatkan anak-anak Indonesia masih banyak yang putus sekolah sebelum mereka menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan kondisi tersebut, bila tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, sulit bagi bangsa ini keluar dari masalah-masalah pendidikan yang ada, apalagi bertahan pada kompetisi di era global.

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah tiap anak bisa sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membedakan status karena itulah hak mereka. Namun hal tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan. Jika mencermati permasalahan di atas, terjadi sebuah ketidakadilan bagi orang-orang yang kurang mampu karena terkendala oleh biaya. Sekarang ini fenomena pendidikan formal di kota-kota besar yang terealisasi lewat sekolah mulai berkembang sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan mulai banyaknya tumbuh berbagai jenis sekolah. Tetapi disisi lain masalah mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan merupakan masalah yang muncul akibat kualitas hasil pendidikan sekolah-sekolah ini yang belum dapat memenuhi standar kualitas atau mutu pendidikan yang memuaskan. Masalah ini kemungkinan juga disebabkan oleh pelaksanaan pendidikan yang belum terlaksana secara efektif dan belum relevan dengan tuntutan kehidupan yang nyata yang ada dalam masyarakat. Dari kenyataan ini, hampir semua orang tua siswa berkeinginan agar anak-anaknya dapat belajar di sekolah yang memiliki kualitas baik serta didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses belajar.

Tanggal 25 maret 2009 merupakan tonggak sejarah baru bagi Sumatera Selatan. Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 tahun 2009 tentang penyelenggaraan program sekolah gratis di Sumatera Selatan. Dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Masyarakat Sumatera Selatan

sepatutnya dapat bernafas lega dengan kebijakan pemerintah ini karena paling tidak dapat meringankan beban biaya sekolah yang selama ini dirasakan cukup memberatkan. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin merupakan salah satu pelopor sekolah gratis. Program Sekolah Gratis yang dicanangkan Gubernur Sumatera Selatan dan Mendiknas Bambang Sudibyo, di Palembang, diterapkan diseluruh kabupaten/kota se-Sumsel. Sasaran program ini adalah layanan bagi siswa SD hingga SMA/SMK negeri maupun swasta pada 15 kabupaten/kota di seluruh Sumsel. Sekolah gratis diperuntukkan untuk biaya operasional sekolah, Dana pendidikan sekolah gratis diutamakan digunakan untuk :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, seperti fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya;
2. Pembelian buku referensi dan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan;
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya, seperti untuk honor jammengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba;

4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, seperti untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa;
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti listrik, air, telepon, internet, dan biaya pengelolaan lingkungan, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah, dan khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik apabila sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar, maka diperkenankan untuk membeli genset.
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelear, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
9. Pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi program sekolah gratis pada SD/MI.
10. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja kepala sekolah;

11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah seperti sepeda, perahu penyeberangan, dll;
12. Pembiayaan pengelolaan program sekolah gratis seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan program sekolah gratis dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana program sekolah gratis di Bank/Kantor Pos.
13. Pembelian komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 2 set untuk SMA/SMK/MA.
14. Pembayaran honorarium wali kelas dan wakil kepala sekolah, serta kelebihan mengajar (lebih dari 24 jam) secara nyata berdiri di depan kelas yang belum di alokasikan dari sumber dana lain..

Sumber dana berasal dari Dana bersama (*sharing*) dari pemerintah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Dana yang ditopang pemerintah daerah untuk tiap tingkatan sekolah yaitu, untuk SD sebesar Rp.10.000 per siswa per bulan, SMP Rp.15.000 per siswa per bulan, dan SMA Rp.80.000 per siswa per bulan, serta siswa SMK Rp.90.000 setiap siswa per bulan. Pembagian sumber dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten setiap daerah berbeda-beda. Tergantung kemampuan yang diajukan setiap pemerintah kabupaten untuk membantu sumber dana. Seperti di Kabupaten Ogan Ilir yaitu 75% berasal dari Pemerintah Provinsi dan 25% dari Pemerintah Daerah dimana Rp.60.000 berasal dari pemerintah

dan 25% dari Pemerintah Daerah dimana Rp.60.000 berasal dari pemerintah provinsi yang dialokasikan setiap tiga bulan sekali dan Rp.20.000 berasal dari pemerintah kabupaten yang dialokasikan setiap enam bulan sekali ke sekolah-sekolah yang ada di Ogan Ilir.

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan adalah langkah yang konkrit untuk melakukan pemerataan pendidikan. Meskipun dana sekolah gratis diberikan kepada setiap siswa tanpa melihat status ekonomi, tetapi dampak dari pengadaan sekolah gratis sudah membantu terlebih kepada keluarga siswa yang kurang mampu. Kerena salah satu permasalahan umum dalam dunia pendidikan adalah masalah kemiskinan dan mahalanya biaya pendidikan. Menurut (Suparlan, 1995:38) kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum. Berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Dari hasil evaluasi Departemen Dalam Negeri masih ada enam dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Selatan masuk kategori tertinggal, dan masyarakatnya yang tergolong miskin masih cukup banyak. Padahal, daerah ini kaya minyak dan bahan tambang. Menurut Dirjen Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) di Sumsel masih terdapat 1,3 juta jiwa (19,5 persen) masyarakat miskin dari total penduduk Sumsel yang mencapai tujuh juta jiwa. Kenyataannya pula, pendapatan per kapita masyarakat Sumsel masih tergolong rendah, hanya Rp

617.000 per bulan atau masih di bawah rata-rata nasional Rp 624.000/bulan. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel berada pada peringkat 13 secara nasional. Di Sumsel dipaparkan pula, angka pengangguran terbuka yang mencapai 9,34 persen, dan masih tergolong di atas rata-rata angka pengangguran nasional. (*Kompas*, 3 April 2009)

Ketidakmampuan orang tua siswa dalam membiaya sekolah anak memaksa anak untuk berhenti sekolah bahkan tenaga anak usia sekolah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan keadaan seperti ini menjadi tugas bagi pemerintah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan agar melahirkan generasi yang mampu meningkatkan kualitas hidup kearah yang lebih baik. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkatkan ide-ide kreatif yang nantinya menumbuhkan inovasi-inovasi baru yang dapat menyerap tenaga kerja dimasa yang akan datang.

Sekolah menengah umum PGRI adalah salah satu sekolah swasta yang ada di Indralaya, sebagaimana diketahui beban biaya di sekolah swasta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sekolah berstatus negeri karena swasta sifatnya mandiri dan bukan milik pemerintah. Oleh karena itu dampak kebijakan dengan menggratiskan sekolah termasuk swasta adalah kebijakan dampak yang positif bagi siswa yang bersekolah swasta. Melalui wawancara secara singkat dengan salah satu siswa bahwa sekolah PGRI Indralaya dengan adanya sekolah gratis tidak hanya uang SPP yang dibebaskan tetapi juga biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler dan biaya lainnya dibebaskan. Sehingga hal ini dirasakan siswa cukup membantu.

telah menikmati hasil kebijakan itu sebagai bentuk bantuan untuk keringanan biaya sekolah. Hal ini menjadi sebuah ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah tersebut untuk mengetahui dampak dari kebijakan Pemerintah tentang sekolah gratis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga siswa kurang mampu yang bersekolah di SMA PGRI Indralaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dampak kebijakan Pemerintah tentang sekolah gratis pada kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga siswa kurang mampu yang bersekolah di SMA PGRI Indralaya. Untuk memperjelas permasalahan penelitian ini, maka perumusan masalah akan dijabarkan dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimana output yang dapat diterima oleh keluarga siswa Kurang mampu dengan adanya sekolah gratis?
2. Bagaimana manfaat (*outcome*) yang dirasakan keluarga siswa kurang mampu dengan adanya sekolah gratis?
3. Bagaimana keuntungan (*Benefit*) yang didapatkan siswa kurang mampu dengan adanya sekolah Gratis?
4. Bagaimana dampak positif kebijakan Pemerintah tentang sekolah gratis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga siswa kurang mampu yang bersekolah di SMA PGRI Indralaya?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 tujuan penelitian

adapun tujuan diadakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak positif dalam hal output, manfaat dan keuntungan yang diperoleh keluarga siswa kurang mampu dengan adanya sekolah gratis

1.3.2 manfaat akademik penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat yang bisa yang bisa diharapkan, yaitu:

1. Penelitian dapat berguna bagi perkembangan konsep dalam ilmu sosial khususnya sosiologi pendidikan mengenai dampak sekolah gratis dalam kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga siswa kurang mampu.
2. Hasil penelitian dapat meninjau manfaat dari pengadaan sekolah gratis dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga siswa kurang mampu
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi studi penelitian lebih lanjut tentang pengadaan sekolah gratis.
4. Hasil penelitian diharapkan dapat meninjau dampak keberhasilan dari pengadaan sekolah gratis di Sumatera Selatan.

1.4 Tinjauan Pustaka.

1.4.1 Program Sekolah Gratis

Salah satu tujuan nasional yang diemban pemerintah adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yang salah satunya adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Karena itu dituntut untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut, sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan dididik.

Guna mencapai kebijakan, pemerintah melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan pengolahan sumber daya tersebut. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua secara terbatas dapat disebut proses implementasi. Dalam proses implementasi kebijakan menjadi program, kebijakan menimbulkan konsekuensi (hasil, efek, atau akibat). Disini konsekuensi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu output, outcome, benefit serta dampak. Langkah untuk melihat dampak bagi masyarakat dapat dikaji dengan manfaat dan keuntungan yang dirasakan masyarakat. Melalui langkah tersebut dampak langsung atau tidak langsung dari kebijakan dapat disimpulkan.

Kebijakan Pemerintah melalui pengadaan sekolah gratis, Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan program sekolah gratis di Sumatera Selatan. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah

mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah Kebijakan ini tentu membawa pengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya siswa kurang mampu. Kebijakan atau program ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pengertian program menurut Moekoijat, (1984: 982)

Program adalah “ suatu rencana yang luas yang mengandung penggunaan dari sumber-sumber yang berlainan untuk waktu yang akan datang dalam suatu pola yang disatukan dan menentukan suatu urutan dari pada tindakan-tindakan dan rencana – rencana waktu yang diperlukan untuk masing-masing sumber, guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan”

Program dapat berarti suatu bentuk rencana yang berisikan perincian pelaksanaan dari perencanaan di tingkat sektor, sedangkan tujuan dibentuknya suatu perencanaan program adalah untuk memperjelas pembedaan-pembedaan ruang lingkup dan usaha pembiayaan di tingkat sektor. Suatu program dapat dianggap baik sering kali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu gagasan-gagasan pendekatan eksperimental dan aplikasi inisiatif baru.

Berdasarkan defenisi-definisi diatas, dapatlah disimpulkan bahwa program adalah rumusan-rumusan yang berisi gambaran tentang pekerjaan, tindakan, gagasan dan pendekatan yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sedangkan untuk memudahkan didalam pelaksanaannya di perlukan suatu proyek.

Begitu pula dengan program yang dilakukan pemerintah provinsi untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan pendidikan di Sumatera Selatan. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar mampu mededikasikan diri dalam perkembangan global, pemerintah provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten membuat program sekolah gratis.

1.4.2 Dampak

Dampak yang muncul akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Tingkat keberhasilan suatu program kebijakan dapat diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat baik dampak secara langsung ataupun tidak. Dampak secara langsung yang dimaksud adalah sasaran dari program itu sendiri dapat tercapai. Seperti contoh sekolah gratis sasarannya adalah pemerataan pendidikan di Sumatera Selatan, dampak dapat terlihat jika angka putus sekolah semakin berkurang. Tetapi dampak yang secara tidak langsung adanya subsistem dari sasaran yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat. Sebagai contoh sekolah gratis pada pemenuhan Kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Dampak adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan. Secara garis besar konsekuensi yang timbul dari pelaksanaan suatu kebijakan dapat berbentuk 2 (dua) dampak yaitu ;

1. Dampak yang diharapkan (dampak positif)

Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintahan telah menentukan dampak apa saja yang akan terjadi, dalam hal ini dampak positif akibat munculnya kebijakan mengadakan

sekolah gratis adalah untuk membantu masyarakat dalam menanggung biaya sekolah guna melakukan pemerataan pendidikan di Sumatera Selatan.

2. Dampak yang tidak diharapkan

Dampak yang tidak diharapkan adalah dampak yang akan muncul apabila akibat-akibat dan konsensus yang terjadi tidak sesuai dengan maksud dilaksanakannya suatu kebijakan yang tidak diantisipasi sebelumnya, seperti munculnya penyalahgunaan dana sekolah gratis yang tidak tepat guna.

Unit-unit sosial yang terkena dampak dari suatu kebijakan meliputi individu dan rumah tangga, kelompok atau organisasi, masyarakat, dan lembaga serta sistem sosial (Wibawa, 1994:53). Menurut Samodra Wibawa dkk (1994: 121) dalam kerangka konsepnya, dampak juga memiliki dua pengertian yaitu *effect* dan *impact*

Dampak dalam pengertian *effect* berarti akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik akibat tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh intervensi program atau tidak, dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran. Sedangkan dampak dalam pengertian *impact* berarti akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik akibat tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh intervensi program atau tidak, dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran.

moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada jumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. (suparlan, 1995: 15)

Wallman (dalam susanto, 1984 :21) mengartikan kemiskinan sebagai beberapa kekurangan atau keadaan kurang tersedianya sumber ekonomi dalam bentuk materi atau non materi yang diperlukan untuk menunjang kehidupan

Menurut Hartomo (1990: 329), faktor penyebab kemiskinan adalah :

1. Pendidikan yang terlampau rendah
2. Malas bekerja
3. Keterbatasan sumber alam
4. Terbatasnya lapangan pekerjaan
5. Keterbatasan modal

menurut SMERU (2001), kemiskinan memiliki berbagai dimensi:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)

Menurut Finsterbush dan Motz (yang dikutip oleh Wibawa, 1994: 43)

Dampak dapat menyentuh berbagai unit sosial (unit dampak), yaitu :

1. Dampak terhadap rumah tangga atau individu
2. Dampak terhadap organisasi atau kelompok
3. Dampak terhadap masyarakat
4. Dampak terhadap lembaga sosial

Dalam penelitian ini, unit pedampak yang digunakan adalah keluarga dan rumah tangga. Dampak terhadap keluarga siswa yang kurang mampu, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dampak yang diteliti adalah pengertian *Impact* dari sekolah gratis dimana adanya akibat yang menimbulkan pola baru pada kelompok sasaran.

1.4.3 Keluarga kurang mampu.

Pada umumnya ketika orang berbicara tentang keluarga kurang mampu atau miskin, yang dimaksud adalah kemiskinan materi. Dalam pengertian ini maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan hidup pokok untuk dapat hidup terus secara layak. Ini sering disebut dengan kemiskinan konsumsi (Tajuddin neor Effendi, 1995: 250).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi

3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga) (Suharto dkk, 2004: 7-8)

Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Ada beberapa hal tanggapan utama untuk mengatasi kemiskinan di antaranya adalah:

1. Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
2. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
3. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

1.4.4 Studi Terdahulu

Berikut ini ada beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah pendidikan dan siswa SMU. Salah satu kajian yang relevan dengan penelitian masalah pendidikan yaitu kajian yang dilakukan oleh Romzy Gumay, Dkk yang berjudul "*Beberapa Masalah Sosial Ekonomi Yang Dihadapi Siswa dan Cara Pemecahan di SMU Negeri di kota Palembang*", dapat diketahui bahwa ada beberapa masalah yang paling sering dihadapi oleh siswa-siswa SMU negeri di kota Palembang yaitu masalah pekerjaan/ jabatan, masalah pergaulan, masalah

tempat tinggal, dan masalah keuangan. Dominannya masalah pekerjaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya karena dewasa ini sulit bagi lulusan SMU untuk mendapatkan pekerjaan, baik karena sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia maupun keahlian yang dimiliki oleh lulusan SMU masih bersifat umum.

Pada sisi lain penelitian ini juga melihat cara siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dimana cara yang paling banyak ditempuh oleh siswa dalam memecahkan masalah sosial ekonominya adalah dengan cara memecahkan sendiri, minta bantuan kepada anggota keluarga. Sedangkan cara yang paling sedikit ditempuh siswa adalah dengan cara minta bantuan pada guru/ kepala sekolah, pada anggota masyarakat, dan minta bantuan pada guru BP. Dengan demikian pola pemecahan masalah sosial ekonomi yang dihadapi siswa dapat dipahami bahwa sebagai orang yang menuju kearah kedewasaan, siswa SMU sudah menunjukkan "sifat kemandiriannya" terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Selain itu, anggota keluarga merupakan orang yang paling dekat ketimbang orang lain, sehingga siswa banyak memanfaatkan anggota keluarga dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah pendidikan juga dilakukan oleh David dalam Tirtosudarmo (1994:21-22) tentang *Faktor penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan di Negara berkembang*. Ia mengemukakan bahwa rendahnya pendidikan yang dicapai oleh penduduk di Negara-negara berkembang disebabkan oleh berbagai faktor. Biaya pendidikan yang mahal dan terus

meningkat dapat dianggap sebagai faktor utama. Kebanyakan penduduk di Negara-negara berkembang hidup dalam kemiskinan sehingga mereka tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Orang tua tidak sanggup menyediakan biaya untuk menyekolahkan anak sehingga mereka berharap anak-anak bisa bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Karena itu tidak mengherankan kalau banyak ditemukan anak-anak meninggalkan bangku sekolah setelah duduk di kelas empat sekolah dasar untuk membantu orang tua mencari nafkah. Apalagi semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Akibatnya jumlah penduduk bersekolah di tingkat pendidikan tinggi menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Pada dasarnya masalah pendidikan berkaitan erat dengan masalah ekonomi, khususnya pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian sundoyo Pitomo (1985). Memperlihatkan urutan pengeluaran tiap jenis kebutuhan rumah tanggadan jenis urutan kebutuhan yang dianggap penting oleh yang berpenghasilan rendah dikota Jakarta. Dari urutan tersebut terlihat kebutuhan akan pendidikan sebagai prioritas terakhir. Pada masyarakat berpenghasilan rendah, pendidikan masih mungkin ditangguhkan daripada kebutuhan lain, seperti pangan, perumahan, dan sandang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi pendidikan anggota rumah tangga sangat tergantung pada kondisi sosial rumah tangga tersebut.

Hasil studi Murray diteliti dan dikembangkan kembali oleh David Mc Clelland dan John W. atkenson Dkk (dalam Sardiman, AM. 1990: 46) yang

akhirnya menghasilkan teori Motif atau kebutuhan untuk berprestasi. Asumsi dasar dari teori kebutuhan berprestasi adalah bahwa tendensi individu dalam menyelesaikan suatu aktivitas berkaitan dengan kekuatan pengharapan kognitif (keinginan) bahwa tingkah lakunya akan mengarah pada konsekuensi tertentu yang memiliki arti penting bagi individu. Jadi individu menekuni atau terlibat dalam aktivitas berprestasi atau situasi yang berkaitan dengan prestasi karena dalam dirinya terdapat keyakinan bahwa terlibatnya itu akan mengarah pada tujuan-tujuan yang bernilai baginya. Menurut Mc Clelland tendensi dipengaruhi insentif-insentif eksternal seperti uang, barang, pujian, status Maupun insentif-insentif internal seperti kepuasan juga dapat disebut sebagai faktor-faktor motivasional eksternal dan internal tergantung pada seseorang yang menggunakan istilah yang disukainya sehingga individu berusaha mencapai prestasi karena adanya faktor-faktor motivasional.

1.4.2 Sekolah Gratis dalam kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi

Siswa kurang mampu.

Pengadaan sekolah gratis adalah suatu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Sasaran yang paling utama dalam pelaksanaan program ini adalah untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu baik yang bersekolah di negeri maupun swasta untuk tetap bisa menikmati bangku sekolah tanpa harus dibatasi oleh biaya sekolah yang tidak terjangkau.

Seperti penelitian sebelumnya dimana salah satu masalah pendidikan disebabkan oleh kemiskinan atau perekonomian yang tidak memadai. Dalam penelitian ini mengenai dampak sekolah gratis dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga tidak mampu, dimana dengan adanya kebijakan sekolah gratis dapat menciptakan perubahan-perubahan ekonomi masyarakat. Ketika sasaran utama dari sekolah gratis adalah untuk melakukan pemerataan sekolah di Sumatera selatan, tetapi dalam penelitian ini bagaimana kebijakan itu juga mempengaruhi unit-unit sosial lainnya seperti keluarga siswa kurang mampu. Peneliti ingin mengkaji bagaimana orang tua siswa menggunakan dana ataupun biaya yang selama ini dipergunakan untuk biaya sekolah anak dan mengalihkan pemanfaatanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

1.5 Kerangka Pemikiran.

1.5.I Program Sekolah Gratis

Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Karena itu dituntut untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut, sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan dididik. Mengingat bahwa pendidikan memiliki harga yang mahal dimana tidak dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat khususnya dari lapisan masyarakat kurang mampu atau keluarga miskin.

Pada umumnya ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan materi. Dalam pengertian ini maka seseorang masuk dalam

kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan hidup pokok untuk dapat hidup terus secara layak. Ini sering disebut dengan kemiskinan konsumsi (Tajuddin neor Effendi, 1995: 250).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

4. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
5. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup

masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

6. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Ada beberapa hal Tanggapan utama untuk mengatasi kemiskinan di antaranya adalah:

4. Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
5. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
6. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Mulai dari bentuk bantuan sampai pada penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Pemerintah juga mengupayakan intervensi yang bertujuan untuk memulihkan keberfungsian sosial, atau mereka yang dibantu,

struktur sosial atau pranata sosial dapat menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya. Konsep lain dari Merton memasuki sebuah konsep baru yaitu sifat dan fungsi.

Robert K Merton seorang pentolan teori fungsionalisme struktural berpendapat bahwa obyek analisis sosiologi adalah fakta sosial seperti : peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial. Merton kemudian menawarkan lima perspektif yang dinilainya lebih baik, Kaitannya dengan pembahasan ini diambilkan pendapat Merton yang keempat. Teori-teori fungsional sebelumnya mencampuradukkan antara subjective disposition (konsekuensi tindakan yang diharapkan) dengan objective consequences (konsekuensi tindakan yang bersifat obyektif). Menurut dia, keduanya harus dibedakan, yaitu mana fungsi yang *manifest* dan mana fungsi yang *latent*.

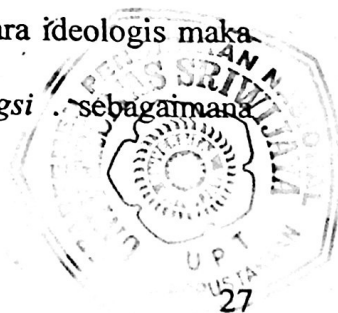
Fungsi *manifest* adalah fungsi yang diharapkan (*intended*), konsekuensi obyektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan disadari oleh para partisipan dalam sistem tersebut. Sedangkan *fungsi latent* adalah sebaliknya yakni fungsi yang tidak diharapkan atau fungsi yang tidak disadari (Paloma 2000: 39).

Fungsi *manifest* dari sebuah kebijakan Pemerintah tentang tentang sekolah gratis adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan melakukan pemerataan pendidikan di Sumatera Selatan. Dengan sekolah gratis Pemerintah mengharapkan agar setiap siswa bisa menikmati pendidikan dari sekolah dasar sampai pada tingkat sekolah menengah atas. fungsi *latent* dimana keberadaaan

1.5.2 Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah : fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan.

Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem, fungsional terhadap yang lain. Secara ekstrim penganut teori beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian pada tingkat tertentu umpunya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras bahkan kemiskinan diperlukan oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik , penganut teori fungsionalme structural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam seimbang. Hampir semua penganut teori ini berkecenderungan untuk memusatkan perhatiannya kepada fungsi dari suatu fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya. Perhatian struktural fungsional lebih banyak ditunjukkan kepada fungsi-fungsi dibandingkan dengan motif-motif. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Oleh karena fungsi itu bersifat netral secara ideologis maka Merton mengajukan pula satu konsep yang disebut *dis-fungsi* sebagaimana



latent adalah sebaliknya yakni fungsi yang tidak diharapkan atau fungsi yang tidak disadari (Paloma 2000: 39).

Fungsi *manifest* dari sebuah kebijakan Pemerintah tentang tentang sekolah gratis adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan melakukan pemerataan pendidikan di Sumatera Selatan. Dengan sekolah gratis Pemerintah mengharapkan agar setiap siswa bisa menikmati pendidikan dari sekolah dasar sampai pada tingkat sekolah menengah atas. fungsi *latent* dimana keberadaan sekolah gratis memberikan fungsi yang tidak sadari yaitu membantu siswa kurang mampu dalam hal pemenuh kebutuhan keluarga.

Pemberian sekolah gratis yang diberikan merata kepada setiap siswa tanpa memperhatikan status sosial ekonomi, maka Output dari sekolah gratis adalah membebaskan setiap siswa untuk dari beban biaya sekolah. Dalam hal ini bagaimana keluarga siswa kurang mampu memanfaatkan uang yang sebelumnya digunakan untuk biaya sekolah anak dialokasikan untuk keperluan keluarga sehingga membawa dampak yang positif bagi keluarga siswa melalui manfaat yang dirasakan

1.5.2 Perubahan sosial.

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Masih banyak faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang dapat disebutkan, ataupun

mempengaruhi proses suatu perubahan sosial. Kontak-kontak dengan kebudayaan lain yang kemudian memberikan pengaruhnya, perubahan pendidikan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, penduduk yang heterogen, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang semula dianggap menyimpang dan melanggar tetapi yang lambat laun menjadi norma-norma, bahkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang bersifat formal

Adanya proses perubahan mengidentifikasi bahwa masyarakat pada dasarnya tidaklah stagnan, karena dengan proses sosial maka kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu perubahan sosial budaya sangat besar sekali. Hal ini sejalan dengan pendapat george simmel yang menyatakan bahwa mekanisme perubahan sosial sebagai hasil dinamisasi proses sosial dalam masyarakat. Menurut Selo Sumardjan dalam Soekanto (2005:305), perubahan sosial merupakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa sesuatu yang tidak menarik dalam arti kurang menyolok, dan ada pula perubahan-perubahan yang berpengaruh luas serta ada juga perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenali nilai-nilai sosial, norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, kewenangan

(Soerjono Sukanto, 2005; 302)

Sementara itu Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan Masyarakat eropa yang sekian lama terbelenggu oleh nilai katolik ortodoks, kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih ssuai dengan tuntunan kehidupan modern.

Salah satu cara yang berguna dalam meninjau perubahan sosial ialah dengan memperhatikan darimana sumber terjadinya perubahan itu. Jika sumber perubahan itu. dari dalam sistem sosial itu sendiri, dinamakannya *perubahan imanen*. Jika sumber ide baru itu berasal dari luar sistem social, yang demikian itu disebut *Perubahan kontak*.

Selain itu perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara lebih luas akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan karena secara alamiah tidak ada masyarakat yang stagnan atau statis, melainkan selalu berubah secara dinamis. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat ada yang dikehendaki *intended change* dan ada juga tidak dikehendaki *unintended change*, serta ada juga perubahan yang direncanakan *planned change* atau diciptakan dan ada juga perubahan yang terjadi secara tidak terduga *unplanned change*, misalnya karena bencana alam, perang dan karena pengaruh-pengaruh alamiah diluar dugaan dan perubahan-perubahan dan prediksi manusia.

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan terhadap masyarakat. Pihak yang menghendaki

perubahan dinamakan *agen of change*, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Agen of change* memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat (Soerjono Sukanto, 2005: 316).

Dampak yang tidak dikehendaki *unintended change* secara alamiah akan muncul dalam berbagai kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn dalam Samodra wibawa (1994: 5) bahwa kebijakan akan menimbulkan suatu konsekuensi yaitu hasil, efek atau juga akibat. Dunn membagi konsekuensi menjadi dua jenis yaitu output dan dampak. Output merupakan barang, jasa, fasilitas yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang tidak disentuh oleh kebijakan. Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun non fisik (sosial budaya)

Suatu perubahan yang dikehendaki timbul sebagai reaksi (yang direncanakan) terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya, baik merupakan perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Menurut Thomas dan Znaniecki perubahan yang dikehendaki sebagai suatu tehnik sosial, yang ditafsirkan sebagai suatu proses yang berupa perintah dan larangan. Artinya menetralisasikan suatu keadaan krisis dengan suatu akomodasi (khusus arbitrase) untuk melegalisasikan hilangnya keadaan yang

tidak dikehendaki atau berkembangnya suatu keadaan yang dikehendaki. Legalisasi tersebut dilaksanakan dengan tindakan-tindakan fisik yang bersifat arbitrase (Soerjono Sukanto, 2005:317).

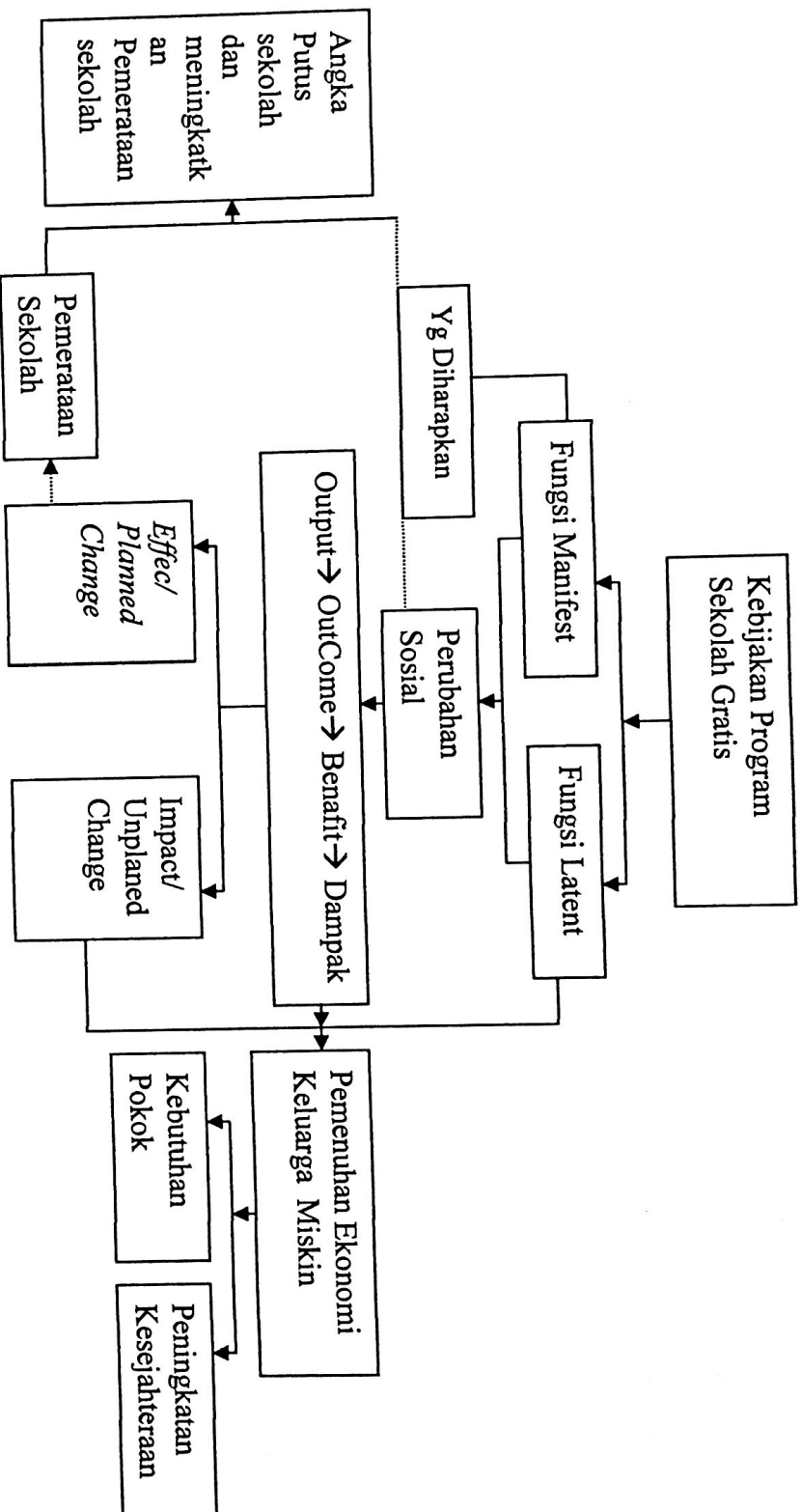
Umumnya perubahan terencana tidak selalu identik dengan keberhasilan. Keinginan untuk mempercepat perubahan telah menyebabkan lebih cepat laju peranan ilmu pengetahuan tentang bagaimana memperkenalkan inovasi ke masyarakat. Jika hasil-hasil penelitian komunikasi yang dilakukan dalam penyebaran ide-ide baru itu dikumpulkan dengan baik, kita akan dapat menggunakannya untuk merencanakan program perubahan terencana secara lebih efektif. Sudut tinjauan lainnya bisa dilakukan dengan melihat perubahan itu dan unit pengadopsi atau yang menerima ide-ide baru itu. Dalam hal ini ada dua macam yaitu perubahan individual dan perubahan sistem- sosial. Banyak perubahan yang terjadi pada level individual, dimana seseorang bertindak sebagai individu yang menerima atau menolak inovasi.

Perubahan pada level ini disebut dengan bermacam-macam nama, antara lain difusi, adopsi, modernisasi, akulturasi, belajar atau sosialisasi. Perubahan yang terjadi pada level sistem sosial. Ada berbagai istilah yang dipakai untuk perubahan macam ini, misalnya pembangunan, sosialisasi, integrasi atau adaptasi. Disini perhatian kita terarah pada level sistem sosial, karena itu digunakan istilah perubahan makro. Tentu saja perubahan pada kedua level itu berhubungan erat, jika kita menganggap sekolah hubungan pemerintah dengan masyarakat sebagai suatu sistem sosial, maka pengadopsian suatu intervensi program yang dilakukan dibidang pendidikan yaitu sekolah gratis akan membawa kita pada proses

perubahan, output, manfaat, keuntungan dari sekolah gratis yang menimbulkan dampak yang positif bagi sistem sosial.

Kronologi berfikir dalam program sekolah gratis adalah bagaimana biaya sekolah yang telah ditanggung oleh pemerintah dapat memberikan fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest dari sekolah gratis adalah fungsi yang diharapkan yaitu untuk melakukan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam penelitian ini akan melihat Fungsi laten sebagai fungsi yang tidak diharapkan dari kebijakan sekolah gratis yaitu membantu keluarga siswa kurang mampu yang memberi dampak positif bagi keluarga siswa. Dampak positif yang dimaksud dapat dilihat dari output, manfaat, serta keuntungan dari sekolah gratis bagi pemenuhan kebutuhan keluarga siswa kurang mampu. Dengan mempelajari beberapa definisi dampak sebagai Impact, dapat kita peroleh suatu kerangka teori bahwa dampak dari suatu kebijakan pemerintah merupakan akibat yang diharapkan ataupun tidak mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran. Dalam konteks ini, dampak pelaksanaan program sekolah gratis membawa akibat pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga siswa kurang mampu, baik yang diharapkan maupun tidak dan yang mampu membawa perubahan perekonomian keluarga siswa.

Bagan 1.5.3 Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber : Olahan dari Data Primer (Modifikasi)

1.6 Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi. Analisis dan konstruksi dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebenaran sebagai suatu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena dalam metode penelitian kualitatif memiliki fokus yang kompleks dan luas. Selain itu penelitian kualitatif bermaksud untuk memberikan makna atas fenomena secara holistik dan penelitian harus berperan aktif dalam keseluruhan proses studi atau penelitian.

1.6.1 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal ini merupakan suatu pilihan untuk mencapai pengertian fakta sosial dalam suatu penelitian melalui pendeskripsian mendalam sehingga akan diperoleh suatu makna terhadap gejala sosial yang diamati. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena dimana yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 1997;254).

Berdasarkan pada metode yang dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu dengan mengambil beberapa elemen dan masing-masing diselidiki secara mendalam, serta kesimpulannya terbatas pada elemen-elemen yang diselidiki saja (Marzuki, 1997; 41). Dalam penelitian ini dijelaskan

mengenai Dampak Kebijakan Pemerintah tentang Sekolah Gratis pada kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga siswa kurang mampu.

1.6.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Ogan Ilir yaitu tempat tinggal orang tua ataupun tempat tinggal siswa SMA PGRI. Dan Sumber data Informan diperoleh dari SMA PGRI Indralaya yang beralamat di Indralaya Utara- Gang Lampung. Hal tersebut dikarenakan SMA PGRI adalah salah satu sekolah di Indralaya yang menggunakan sekolah gratis dan memanfaatkan sesuai prosedur dan peraturan tentang kebijakan sekolah gratis. Adapun alasan peneliti memilih tempat karena secara umum latar belakang keluarga siswa berasal dari keluarga Kurang mampu.

1.6.3 Unit Analisis Data

Adapun yang menjadi unit analisis adalah Keluarga, dalam penelitian ini difokuskan pada keluarga siswa yang memiliki tingkat ekonomi kurang mampu ditambah dengan informasi dari pihak-pihak yang mendukung data penelitian, seperti teman-teman sekolah, guru, dan kepala sekolah serta lingkungan yang dekat dengan subjek penelitian.

1.6.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2002). Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu relatif singkat

informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan data dan informasi. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan secara *purposive*. *Purposive* adalah informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan utama dan Informan pendukung. Yang dimaksud dengan Informan Utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, Informan dalam penelitian ini berjumlah sepuluh informan. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah Orang Tua Siswa. Dan informan pendukung ialah yaitu Siswa-Siswi PGRI, Kepala Sekolah serta Guru-Guru SMA PGRI.

1.6 .5 Batasan Pengertian

1. **Dampak** adalah pengaruh yang menimbulkan akibat-akibat tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan memberi benturan yang sangat hebat yang menyebabkan perubahan sosial (Daryanto, 2002: 90)
 - **Output** adalah Fasilitas yang diterima oleh masyarakat berupa jasa atau barang sebagai implementasi dari sebuah kebijakan
 - **Outcome** adalah manfaat yang dirasakan sekelompok masyarakat tertentu dari adanya pengadaan jasa atau fasilitas dari sebuah kebijakan.

- **Benefit** adalah keuntungan yang dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu dari pengadaan jasa atau fasilitas, dalam penelitian ini dimaksud adalah keuntungan yang dapat dinikmati keluarga siswa kurang mampu dengan adanya sekolah gratis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
2. **Kebijakan Program** adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang (pemerintah) dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang (masyarakat) dalam mencapai tujuan tertentu
 3. **Siswa kurang mampu** adalah Murid yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan sekolah sebagai akibat standar ekonomi keluarga yang rendah. Dalam penelitian ini keluarga tidak mampu dapat dilihat dari pekerjaan dan tingkat pendapatan orang tua, Jumlah anak yang masih sekolah dan status tempat tinggal.
 4. **Sekolah Gratis** adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

1.7 Data dan sumber data

Data di dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yang berasal dari, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang berupa hasil pembicara dan tindakan serta beberapa keterangan dan informasi yang diperoleh dari informan, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang tua siswa.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber yang sifatnya secara tidak langsung mampu melengkapi data primer. Sumbernya didapat dari data tertulis berupa dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan tentang dana sekolah gratis yang diperoleh di sekolah SMA PGRI Indralaya ataupun ataupun informasi dari tempat lain. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Sekolah SMA PGRI Indralaya, Guru-guru PGRI Indralaya.

1.8 Tehnik pengumpulan data

Menurut (Burhan Bungin, 2003) Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu :

1) Pengamatan secara langsung atau Observasi (*getting in*)

Pengadaan observasi dilakukan secara langsung terhadap realitas yang berpengaruh dan dipengaruhi dilapangan. Peneliti berusaha memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang fenomena yang menjadi objek penelitian dimana mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi terhadap keluarga kurang mampu dilakukan dengan melihat

langsung keadaan atau kondisi dalam keluarga yang mana sumber data tentang keluarga miskin diperoleh dari sekolah siswa yang bersangkutan berupa surat keterangan observasi yang sebelumnya yang dilakukan oleh sekolah untuk kepentingan pemberian bantuan keluarga miskin (BKMM). Hal ini ditinjau kembali oleh peneliti dengan melakukan observasi kerumah siswa, pencacatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Data yang diperlukan berupa data kualitatif yaitu yang diukur secara tidak langsung misalnya berupa sikap, aktifitas yang terjadi (Marzuki, 1997:55). Observasi yang dilakukan penelitian adalah (*observasi participant*) dimana peneliti ikut terlibat dalam proses kegiatan orang yang diamati. Dengan observasi partisipasi diharapkan akan diperoleh data yang lebih akurat dan asli, sehingga fakta yang sesungguhnya mengenai dampak sekolah gratis dalam memenuhi kebutuhan keluarga siswa kurang mampu.

2) Wawancara mendalam (*in-dept interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. Wawancara mendalam bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara. Data yang diperoleh melalui wawancara dilakukan dalam membentuk pembicaraan informal dan dilakukan ketika jam istirahat atau dirumah keluarga siswa. Walaupun wawancara ini dilakukan secara informal terhadap subjek penelitian maupun dengan pihak yang terkait tetapi tetap menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya

agar wawancara yang dilakukan tidak meluas dari fokus permasalahan. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam, melalui wawancara mendalam maka dimungkinkan sumber data dapat memberikan dan mengeluarkan ide pemikiran atau isi hatinya secara lebih lengkap dan mendalam.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip yang berkaitan dengan Fokus Penelitian.

4). *Getting Out*

Menurut (Burhan Bungin, 2003: 58) Proses pengumpulan data dihentikan setelah dianggap “Jenuh”, yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi dari lapangan. Artinya, peneliti selalu memperoleh informasi dan jawaban yang sama atau sejenis dari informan baru. Situasi ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dan berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

1.9 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, (dalam Sugiyono, 2003:276-281), ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dianalisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data. Dengan demikian data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan melihat sajian data, maka peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Sajian data di sini berupa data-data hasil observasi dan wawancara kepada keluarga siswa yang telah dilakukan selama proses penelitian.

3. Kesimpulan.

Kesimpulan adalah jawaban akhir dari masalah yang diteliti, penelitian yang disajikan setelah melakukan penyusunan informasi dan sajian data yang telah dibuat.

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab Satu merupakan pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat, Tinjauan pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II DESKRIPSI LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

Bab dua mendeskripsikan gambaran tentang wilayah penelitian secara umum tentang Ogan Ilir secara khusus mengenai diskripsi subyek penelitian studi kasus.

BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Bab tiga berisikan tentang uraian hasil penelitian yang dilakukan serta analisis data.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab empat pada akhir tulisan ini akan di kemukakan kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan mengusulkan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwikarta, Sudardja.1988. *Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan Dengan Masyarakat*. Jakarta: Debdikbud.
- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian. (suatu pendekatan dan praktek)*. Yogyakarta: Rieneka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan metodologis kearah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chan, M, Sam. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Daryanto SS. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Apolo.
- Hasbullah. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Ifdhal Kasim.2005. *Hak Atas Pendidikan*. Jakarta. Elsam
- Kurniawan. Idham. 2001. *Manusia Budaya dan Lingkungan Kajian Ekologi Manusia*. Bandung: Humaniora utama Press.
- Marzuki. 1995. *Metodelogi Rise*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2001. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remeja Rosdakarya.
- Nanning Mardiniah.2005. Mengutip dari data yang dipaparkan Fasli Jalal, Dirjen Diknas dalam Seminar tentang Konsep *Pendidikan Gratis Bagi Semua Orang*.Jakarta: diselenggarakan LP3ES.
- Purwanto, M, Ngalm. 1996. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Ritzer (Ali Mandan) .2003. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigm Berganda*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romzy Gumay.2004. *Beberapa Masalah Sosial Ekonomi Yang dihadapi Siswa dan Cara Pemecahannya di SMU Negeri di kota Palembang*.

Sugiyono.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabet.

Suharto edi.2004. *kemiskinan dan keberfungsian sosial:study kasus rumah tangga miskin di Indonesia*. Bandung : STKS Press.

Sumatera Selatan dalam angka. 2009.BPS Sumatera Selatan.

Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di perkotaan*. Jakarta: yayasan obor Indonesia.

Susanto, phil Astrid. 1985. *Pengantar sosiologi dan perubahan sosial*. Jakarta:bina cipta.

Sardiman, AM. 1990. *Interaksi Dari Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta

Soekamto, soerjono.2005. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Pt raja grafindo persada.

Tajuddin Noer Effendi. 1995. *Sumber Daya manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.

Tirtosudarma. 1994. *Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Di Negara berkembang*. Jakarta:

Wibawa samudera, Yuyun purbo kusumo dan agus pramusinto. 1994. *evaluasi kebijakan public*, Jakarta: PT. grafindo persada.

Internet :

Yayan Darwansyah. 2009. Sekolah gratis di Sumsel (online). <http://www.detiknews.com>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2010

Sidik Pramono.2010. Sekolah di Sumatera Selatan (online). <http://www.mediaindonesia.com> Diakses pada Tanggal 13 Februari 2010.

Akhmad Sudrajat.2010. Teori Motivasi Maslow (online). <http://www.mediaindonesia.com>. Diakses pada Tanggal 22 Maret 2010.

Sumber Lain

Nurly gustino.2007. *Dampak penataan dan pengembangan kawasan wisata benteng kuto besak Palembang*. Skripsi: Jurusan Sosiologi. Universitas sriwijaya

Kompas. 3 April 2009. *Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan*. Dikutip pada tanggal 20 Maret 2010.

D/LL/31/BI T